



# Treasury Policy Brief

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Edisi Nomor 18, Februari 2019

## ***Government as Platform* pada Modernisasi Sistem Pembayaran Pemerintah\*)**

Istilah apalagi ini? Setelah badai istilah dari SPAN dan SAKTI, kini berhamburan istilah baru yang semuanya asing bagi sebagian besar dari kita semua.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sedikit pencerahan atas istilah "*government as platform*" dan apa pentingnya bagi kita sebagai pegawai di Kementerian Keuangan.

Suka atau tidak, kemajuan teknologi saat ini akan menarik semua hal sehingga saling terkoneksi dan menjadi suatu bentuk baru, istilahnya *convergence*. Waduh ada istilah baru lagi.

Walaupun terdengar asing sebenarnya sejak dulu kita sudah sering mengalami, misalnya perpaduan budaya nusantara yang berasal dari berbagai suku bangsa, namun pada akhirnya membentuk budaya nasional yang dapat dibedakan dari budaya negara tetangga.

Dalam konteks diskusi teknologi kekinian, *smart phone* adalah salah satu produk *convergence*. Alat ini mengkompilasi berbagai fungsi yang dulunya melekat pada berbagai alat, mulai dari kalkulator, kalender, surat, dan telepon. Alat ini yang pada jaman milenial ini, akan berdampak pada bagaimana pemerintah menjalankan operasionalnya, dan merespon berbagai permintaan dari masyarakat.

Situasi ini sangat dipahami oleh para pimpinan di Indonesia. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, pada acara Seminar Memperkuat Budaya dan Mindset Digital Kemenkeu 2019 (12/2) di Jakarta, menyampaikan beberapa hal. Diantaranya, harapan pada pegawai Kementerian Keuangan untuk memahami perubahan lingkungan dunia terutama teknologi, sehingga dapat melakukan penyesuaian dan menggunakan teknologi untuk membantu pekerjaannya, bukan malah tergantikan oleh teknologi.

Beliau sangat memperhatikan dampak teknologi pada pertumbuhan inovasi terutama di sektor pembayaran. Munculnya *e-commerce* relatif banyak menyulitkan penentuan pajak. Lokasi pembeli dan penjual serta tempat transaksi menjadi tidak jelas, karena dapat lintas kota, bahkan negara yang memiliki kebijakan perpajakan berbeda.

Namun adanya kesulitan ini, bukan seharusnya pegawai Kemenkeu menolak adanya perubahan namun harus turut mengambil peranan supaya dapat

memahami penyusunan *policy response* yang sesuai konteks saat ini di masyarakat.

"Kemenkeu harus dapat melihat *opportunity* bagaimana *policy responses* untuk mengantisipasi datangnya *The Future of Work*, bagaimana menyiapkan masyarakat menghadapi ekonomi yang baru" ungkap Menteri Keuangan.

Organisasi Kemenkeu ke depan harus lebih dinamis berdasarkan tradisi birokrasi yang didukung sistem informasi yang andal. Proses pertukaran informasi harus memudahkan semua pihak dalam mengambil keputusan. Tujuannya supaya masyarakat Indonesia tidak hanya disasar sebagai pasar, namun juga dapat memenuhi permintaan pasar internasional.

"Kemenkeu harus memahami dan mempunyai kesadaran terhadap transformasi digital dengan menumbuhkan budaya digital dan sebagai *policy maker* harus memikirkan dampaknya terhadap perekonomian. Jangan selalu fokus memikirkan masalah yang *trivial*, wajar jika Indonesia hanya dijadikan sebagai *market*." kata Sri Mulyani.

Kembali ke topik utama, *government as platform* juga bukan hal baru. Ide ini berkembang sejak internet memasuki era *world wide web* generasi kedua, dimana mulainya media sosial. Pada lingkungan teknologi *web 2.0*, pertukaran data sangat dinamis dan dapat melibatkan banyak orang sekaligus. Hal ini sangat sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, dimana secara filosofis pemerintah adalah aksi bersama antar warga, mengumpulkan dana melalui pajak, membuat peraturan, dan menunjuk orang yang akan dipercaya untuk mengelola, demi kepentingan bersama. Harapannya, dengan adanya *web 2.0* maka pemerintahan yang bersifat partisipatif menjadi lebih mudah dijalankan (O'Reilly, 2010).

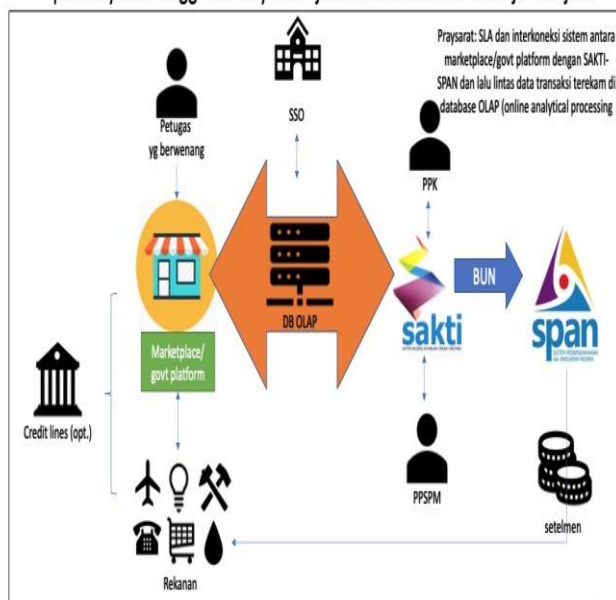
Berdasar peristiwa di atas, maka *government as platform* sebenarnya adalah satu media baru yang bersifat *online*, namun menampung seluruh layanan pemerintah baik bagi internal pemerintah maupun masyarakat. Indonesia, sudah mengarah ke sana. Namun fragmentasi masih sangat kuat. Ada banyak aplikasi buatan institusi pemerintah, namun tidak berhubungan sehingga informasi yang terkumpul sulit dikonsolidasi.

Dalam konteks perbendaharaan misalnya, pemesanan barang belum terhubung otomatis dengan SAKTI dan SPAN sehingga operasional satker sangat tidak efisien dan membutuhkan banyak tenaga untuk *entry* data di beberapa titik. Pemesanan akan menghasilkan kuitansi, yang harus bermaterai dan distempel, kemudian direkam dalam modul SAKTI.

Konvergensi yang sedang direncanakan pada 2019 ini adalah penyatuan proses pemesanan ke dalam proses administrasi keuangan pada SAKTI. Pemesanan barang nantinya akan dijemput melalui *marketplace* yang saat ini sudah tersedia di pasaran. Dalam sistem *marketplace*, kuitansi akan terbentuk dalam format digital sehingga mudah untuk dipergunakan pada sistem selanjutnya.

Pada saat proses *check out*, kodifikasi anggaran akan langsung terisi karena sudah diatur sejak *setting* akun penggunaannya. Data dari *marketplace* nantinya sudah lengkap untuk penyusunan e-kontrak dan SPP. Proses *approval* oleh PPK atas pemesanan hingga pembelian mengikuti alur SAKTI saat ini. Untuk mewujudkan layanan ini, maka perlu dibangun unit *Shared Service*, dimana berwenang mengatur standar komunikasi, kerja sama, serta penyimpanan dokumen elektronik untuk kebutuhan audit maupun litigasi di pengadilan.

Model umum *Shared Service Operation* (SSO) berbasis ERP untuk pembayaran langganan daya dan jasa serta transaksi belanja <50 juta



Sumber : Seminar Memperkuat Budaya dan Mindset Digital Kemenkeu 2019

Pengembangan dari sistem ini dapat diperluas. Karena proses pemesanan sudah tercatat di awal transaksi, maka kebutuhan dana pada BUN dapat diketahui lebih awal dan akurat. Data ini dapat dipergunakan untuk

optimalisasi kas baik pada sisi BUN, maupun kas satker yang dikuasai bendahara. Biaya pengelolaan kas dapat lebih ditekan, karena penempatan akan menghasilkan imbal jasa.

Ke depan, proses *entry* data ke SAKTI dapat diekspansi sejak perancangan kebijakan. Penyatuan ini penting supaya bukti dukung penyelesaian kebijakan pemerintah dapat dikodifikasi secara lengkap, dan dapat dihubungkan dengan transaksi pada APBN. Konvergensi ini penting untuk menjawab misalnya, mengapa penambahan anggaran pendidikan tidak berdampak signifikan pada kualitas lulusan? Kebijakan mana yang paling efisien dan efektif, dan mana yang tidak, lokasi mana yang lebih prioritas, mana yang kurang?

Rencana perubahan ini searah dengan arahan Menteri Keuangan. "Bila kita sudah ada *culture* dan *mindset* digital, saat melihat permasalahan ekonomi ataupun permasalahan masyarakat, kita akan mempunyai *mindset* yang berbeda dalam memandang permasalahan tersebut. Kemenkeu sebagai pengelola anggaran mempunyai *influence* yang besar, seandainya kita gagal dalam memahami transformasi tersebut, *impact*-nya akan luas ke masyarakat."

Namun demikian, konvergen sistem harus memenuhi prasyarat sebagaimana teori yang melandasinya. O'Reilly menekankan bahwa pemerintahan sebagai *platform* harus menyediakan peluang adanya persaingan yang sehat. Lingkungan *platform* yang terlalu dikontrol oleh salah satu pihak atau terlalu bebas sehingga tidak ada regulasi tidak akan berkembang dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat. Lingkungan *platform* harus mengakomodasi kontribusi pengguna, namun ada regulator yang memastikan bahwa kepentingan publik terjaga (O'Reilly, 2010). Fungsi inilah yang nantinya akan dijalankan oleh unit *shared service* dalam ekosistem pembayaran pemerintah.

\*) Kontributor: Seti Gautama, Direktorat Sistem Perbendaharaan

Disclaimer:

- tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.

Daftar Pustaka

O'Reilly, T. (2010). Government as a platform. In D. Lathrop & L. Ruma (Eds.), *Open Government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice*. Sebastopol: O'Reilly. <https://doi.org/10.22459/og.04.2018.03>

**TIM TREASURY POLICY BRIEF****Pengarah**

Sudarso

Direktur Sistem Perbendaharaan

**Pemimpin Redaksi**

Windraty Ariane Siallagan

Kasubdit Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan

**Redaksi**

Iwan Megawan

Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan I

Agung Hartoyo

Kasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan II

Hendi Kristiantoro

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

Nurul Laili

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

**Sekretariat**

Faruq Al Amin

Pelaksana Direktorat Sistem Perbendaharaan

**DISCLAIMER/ LEGAL NOTICE**

*Treasury Policy Brief* adalah rekomendasi kebijakan yang disusun oleh Subdit Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Sistem Perbendaharaan berdasarkan hasil kajian/publikasi Litbang Perbendaharaan. Opini dan pendapat yang dimuat tidak merefleksikan pandangan resmi instansi. Sekretariat: Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt. 4 Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat (10710), email:tpb.litbangdsp@kemenkeu.go.id